MENGHADIRKAN KELAS YANG AKTIF DALAM MELATIH KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI PENERAPAN MODEL JURISPRUDENSI

Nilam Anggraini

Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Email: nilamanggraini76@gmail.com

Abstark: Belajar dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling berhubungan erat dan tentunya tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukasi. Belajar dimaknai sebagai sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat *continuu*, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku bisa terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan bahan pelajaran, metode, penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, keberhasilan dalam proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Dalam proses belajar dan pembelajaran interaksi yang terjadi diantara peserta didik dengan guru diharapkan dapat merangsang keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. Menurut Haryanto, menyebutkan bahwa terdapat enam hal yang mempengaruhi keaktifan peserta didik dikelas yaitu: peserta didik, guru, materi, tempat, waktu, dan fasilitas. Keaktifan peserta didik membuat pembelajaran berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun oleh guru, bentuk aktivitas peserta didik dapat berbentuk aktivitas pada dirinya sendiri atau aktivitas dalam suatu kelompok.

Pembelajaran sejarah juga menuntut keaktifan bagi peserta didiknya dan juga harus bisa mengasah pikiran secara kritis-historis. Pembelajaran sejarah saat ini menuntut harus mampu menjawab tantangan zaman. Reformasi telah membuka

dunia pendidikan untuk memasukkan unsur demokratisasi dalam pembelajaran. Diharapkan kelas bukan hanya lagi sebagai tempat ceramah semata, namun ada interaksi dua arah yang dapat menghasilkan hipotesa baru dalam diskusi pembelajaran.

Kata kunci: Aktif, berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah, dan model jurisprudensi.

PENDAHULUAN

Selama Proses belajar dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas antara peserta didik dan guru yang mengajarnya, tentunya setiap guru akan berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Berbagai sikap dan potensi peserta didik selalu berpengaruh dalam kebiasaan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, banyak ditemukan peserta didik yang masih kurang bersemangat dalam belajar.

Seorang guru memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kelas yang aktif, hal ini diperlukan agar selama proses pembelajaran berlangsung peserta didik akan lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, partisipasi aktif peserta didik sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan berpikir, emosi, dan sosialnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan keaktifan peserta didik salah satunya dalam mata pelajaran sejarah adalah dengan meningkatkan minat peserta didik pada mata pelajaran tersebut, membangkitkan motivasi belajar, serta menggunakan model, metode, dan media yang tepat dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam belajar, dapat membuat anak secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran di kelas.

Seperti kegiatan pembelajaran pada umumnya, pembelajaran sejarah juga menuntut guru agar bisa memaksimalkan pembelajaran dan melibatkan peserta didiknya dalam proses pembelajaran tersebut untuk menghadirkan kelas yang aktif dan pembelajaran yang efektif. Dalam mengemas pembelajaran sejarah diperlukan adanya berbagai inovasi dengan cara memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital. Seperti yang dikemukakan oleh Briggs (1977) dan

Hujair AH. Sanaky (2013: 3), mereka mendefinisikan media pembelajaran yaitu alat atau sarana fisik yang berguna untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik sehingga menimbulkan rangsangan untuk belajar.

Selain itu diperlukan juga strategi pembelajaran yang dirasa cocok dalam perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, dalam hal ini yang akan menjadi fokus pembahasan adalah penggunaan model pembelajaran Jurisprudensi dalam pembelajaran sejarah. Yang akan dilihat adalah efektivitas dari model pembelajaran Jurisprudensi tersebut dalam menghadirkan kelas yang aktif dan peserta didik yang mampu berpikir kritis dalam pembelajaran sejarah. Model pembelajaran tentunya akan ikut menentukan keberhasilan dari tujuan pembelajaran mengingat melalui model pembelajaran tersebut guru mampu memerankan sebuah peran untuk merancang aktivitas peserta didiknya, dan menentukan capaian-capaian yang diinginkan dengan menggunakan kegiatan yang disusun secara terencana selama proses belajar pembelajaran di kelas berlangsung.

KELAS YANG AKTIF DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dengan peserta didik yang didalamnya berisi aktivitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar yang dialami oleh keduanya. Keaktifan belajar peserta didik merupakan salah satu unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aktif berarti giat dalam bekerja atau berusaha. Kegiatan bekerja dan berusaha dilakukan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan (Sardiman, 2001:98).

Salah satu penilaian proses pembelajaran adalah melihat sejauh mana keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses belajar pembelajaran. Nana Sudjana (2004: 61) menyatakan keaktifan peserta didik dapat dilihat dalam hal: (1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat dalam pemecahan

masalah; (3) Bertanya kepada peserta didik lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya; (4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah; (5) Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru; (6) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya; (7) Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis; (8) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan peserta didik bisa dilihat dari berbagai hal seperti memperhatikan (*visual activities*), mendengarkan, berdiskusi, kesiapan peserta didik, bertanya, keberanian peserta didik, mendengarkan, dan memecahkan soal (*mental activities*).

Macam-macam aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah aktivitas fisik dan yang kedua adalah aktivitas psikis. 1) Aktivitas Fisik; adalah gerakan yang dilakukan peserta didik melalui gerakan anggota badan, gerakan membuat sesuatu, bermain maupun bekerja yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas. 2) Peserta didik sedang melakukan aktivitas Psikis; jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Pentingnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran menurut Mulyasa (2002:32), pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Oemar Hamalik (2002:27), menyatakan bahwa dalam proses pendidikan di sekolah, tugas utama guru adalah mengajar sedangkan tugas utama setiap peserta didik adalah belajar. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Menurut Sardiman (2001:47), belajar mengacu pada kegiatan peserta didik dan mengajar mengacu pada kegiatan guru. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik

peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif.

Jika kita kaitkan dengan pembelajaran sejarah, maka keaktifan peserta didik di kelas juga harus diperhatikan guna melihat pencapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, peserta didik juga dapat berlatih untuk berfikir kritis-historis, dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan selama proses pembelajaran sejarah berlangsung. Dalam upaya peningkatan keaktifan peserta didik guru dapat berperan dengan merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran sejarah tersebut.

Idealnya pembelajaran sejarah adalah wahana bagi setiap peserta didik untuk berpikir jauh lebih kritis, mampu memahami makna atau nilai dari setiap peristiwa yang pernah terjadi, bukan sekedar mengingat tokoh, fakta, dan tahun kejadian. Esensi terpenting, dalam setiap peristiwa sejarah yang pernah terjadi, peserta didik diharapkan mampu untuk mengambil nilai-nilai positif yang patut untuk diteladani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu paradigma pembelajaran yang terfokus kepada guru kini harus diubah, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik merupakan perubahan yang paling tepat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sejarah jika selama proses pembelajaran bukan hanya peran guru yang ditonjolkan, akan tetapi peran aktif peserta didik juga dilibatkan dalam pembelajaran tersebut.

BERPIKIR KRITIS DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Berpikir merupakan proses yang penting dalam setiap kehidupan manusia. Sepanjang hayatnya manusia akan terus melakukan aktivitas berpikir. Kemampuan berpikir seseorang dapat berasal dari dalam dirinya sendiri, namun kemampuan tersebut juga dapat dilatih dan dikembangkan sehingga menjadi sebuah kemampuan yang berbeda antar tiap individu. Berpikir bisa memungkinkan setiap orang untuk dapat merepresentasikan dunia sebagai model

dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginannya.

Kemampuan setiap orang agar dapat berhasil dalam kehidupannya ditentukan oleh kecakapan berpikirnya dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kemampuan setiap orang dalam berpikir kritis merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki oleh individu. Dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir setiap orang dapat dilakukan dengan melalui proses pembelajaran dilingkungan sosial tempat tinggalnya. Sementara itu bagi individu yang menempuh bidang pendidikan di sekolah hal ini tentunya akan membantu individu tersebut untuk semakin meningkatkan kemampuan berpikirnya, bahkan menuju konteks berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Salah satu pembelajaran di sekolah yang mengharuskan peserta didiknya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah mata pelajaran sejarah. Sejarah merupakan mata pelajaran yang fungsinya menumbuh kembangkan cara berpikir kritis bagi setiap peserta didik. Pembelajaran sejarah merupakan kajian ilmiah tentang manusia, kesuksesan dan kegagalannya, dan evolusi masyarakat, beserta berbagai aspeknya, seperti politik, ekonomi, sosial, kultural, seni, kebudayaan, dan sebagainya. Mata pelajaran ini menawarkan materi yang sangat luas, melibatkan berbagai keterampilan, dan mengarah kepada pemahaman yang mendalam serta generalisasi yang akan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. (Kochhar, 2008: 68).

Terdapat berbagai kendala selama proses belajar pembelajaran di sekolah berlangsung, tidak terkecuali pembelajaran sejarah. Beberapa permasalahan dalam pembelajaran sejarah adalah kurang mendapat apresiasi positif dari peserta didik di sekolah. Sebagian peserta didik ada yang beranggapan bahwa pembelajaran sejarah kurang menyenangkan atau tanpa variasi. Pembelajaran sejarah juga sering berjalan satu arah (monoton), guru terus memberikan materi dengan ceramah tanpa melihat potensi yang dimiliki oleh para peserta didik.

Kemampuan berpikir kritis peserta didik menjadi tidak berkembang dengan baik karena mereka kurang diberikan ruang untuk memaparkan pandangan

serta analisisnya ketika pembelajaran berlangsung. Pengajaran masih dipakai oleh para guru sebagai paradigma utama, semua proses penyampaian hanyalah sebagai transfer materi semata, bukan sebagai transformasi nilai. Melihat fenomena ini, paradigma pengajaran harus diubah menjadi paradigma pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada proses pengembangan potensi diri peserta didik. Guru sejarah harus mampu menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran sejarah, dan wajib memiliki kompetensi yang baik dalam memaparkan makna atau nilai yang terkandung dari setiap materi yang disampaikan.

Proses pendidikan bukanlah suatu proses menghafal fakta-fakta atau membiasakan diri untuk menempuh ujian akhir, ujian negara, tetapi merupakan suatu pengalaman hidup yang nyata dengan menghadapi masalah-masalah riil serta memecahkannya yang diikuti dengan tindakan (Tilaar, 2006: 129). Untuk mencapai tujuan tersebut yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya agar kemampuan berpikir kritis peserta didik semakin berkembang dengan memberikan pemahaman secara konseptual yang harus diberikan secara sistematis. Guru juga perlu memberikan peluang kepada peserta didik untuk ikut serta memberikan argumentasi terhadap materi yang telah diajarkan.

Kuntowijoyo (2008: 3) berpendapat sistem pada jenjang sekolah menengah atas pembelajaran sejarah sudah mengarah kepada pemahaman secara mendalam berbagai peristiwa sejarah yang dianggap penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis-historis, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, kepedulian sosial dan semangat kebangsaan.

Pembelajaran sejarah sangat sesuai dalam membangun kemampuan berpikir kritis peserta didiknya, apalagi pada pembahasan yang kontroversial, pembelajaran sejarah berpotensi membuat peserta didik bertanya-tanya terkait kebenaran peristiwa sejarah. Yang perlu diutamakan adalah bagaimana menciptakan dialog secara ilmiah, bukan hanya sekedar debat kusir yang berlangsung selama pembelajaran sejarah tersebut. Oleh karenanya, peserta didik perlu diarahkan dan dibimbing. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran sejarah seperti halnya mata pisau bermata dua yang menjadikan peserta didik cerdas atau justru

semakin tenggelam dalam kebingungannya dalam menangkap makna atau nilai dari pembelajaran sejarah.

Dalam pembelajaran sejarah upaya untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik adalah dengan mengintegrasikan ide-ide *critical pedagogy* dalam pembelajaran sejarah *critical pedagogy* (pedagogi kritis) merupakan tema kajian bidang pendidikan yang kemudian menjadi sebuah paradigma kritis pendidikan. Ruh dari gagasan *critical pedagogy* dipengaruhi oleh pemikiran setiap proses yang dilalui dalam pembelajaran sejarah pasti mempunyai masalah-masalah atau kendala-kenadala. Seperti yang kritis Paulo Freire (1921-1997), seorang pakar sekaligus praktisi pendidikan berkebangsaan Brazil (Hidayat, 2013: 2).

Dari pemaparan diatas bahwasanya dalam pengembangan berpikir kritis pada pembelajaran sejarah yang dilakukan guru yaitu terkait berparadigma terhadap kurikulum 2013 yang diterapkan sekarang ini dalam dunia pendidikan di Indonesia, bahwa pembelajaran harus bersifat *student center*, dimana model dan media pembelajaran menjadi role, dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif, dan materi pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual disini dalam artian guru sejarah bukan hanya mengajarkan masa lalu, tetapi guru tersebut mengajarkan bagaimana kita belajar dari masa lalu dengan mengambil nilai atau makna dari setiap pembelajaran yang disampaikan.

PENERAPAN MODEL JURISPRUDENSI DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Sekolah merupakan jalur pendidikan formal yang memiliki kewajiban untuk menciptakan generasi muda yang cerdas dan berpikir kritis sehingga mampu mengatasi berbagai konflik/permasalahan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan baik permasalahan yang terjadi dalam dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Guru sebagai fasilitator harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat untuk melatih peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk kemampuan berpikir kritis adalah model pembelajaran Telaah

Yurisprudensi yang dipelopori oleh Donal Oliver dan James P. Shaver. Model pembelajaran ini lahir berdasarkan atas pemahaman masyarakat di mana setiap orang berbeda pandangan dan prioritas antara satu dengan lainnya, dan nilai-nilai sosialnya saling berkonfrontasi satu sama lain (Uno, 2009: 30).

Model pembelajaran Jurisprudensi selain bertujuan agar peserta didik mampu berpikir sistematis terhadap isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, model pembelajaran ini juga dapat menciptakan peserta didik yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Uno (2009:31) dalam model ini melatih peserta didik untuk peka terhadap permasalahan sosial, mengambil posisi (sikap) terhadap permasalahan tersebut, serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Model ini juga dapat mengajarkan peserta didik untuk menerima atau menghargai sikap orang lain terhadap suatu masalah yang mungkin saja bertentangan dengan sikap yang ada pada dirinya sendiri.

Model pembelajaran Jurisprudensi berhubungan dengan pembelajaran dilingkungan sosial. Hal ini sesuai dengan beberapa teori pembelajaran yang dikembangkan oleh para pakar pendidikan dan psikologi, teori pembelajaran sosial adalah salah satu teori pembelajaran yang dikembangkan pakar psikolog asal Amerika, yaitu Albert Bandura. Menurutnya yang disebut dengan teori belajar sosial (*social learning theory*), adalah anak-anak akan membentuk perilakunya dari mencontoh atau meniru apa yang dilihatnya sehari-hari. Anak dalam perkembangan hidupnya selalu belajar dengan mengamati apa yang dilakukan orang lain. Melalui cara belajar mengamati juga disebut “modeling” atau “imitasi/*imitation*”, anak dengan kemampuan kognitif mereka mengamati perilaku orang lain dan kemudian mengadopsi perilaku itu ke dalam dirinya.

Teori pembelajaran yang juga cocok dengan model pembelajaran Jurisprudensi adalah teori pembelajaran Revolusi Sosiokultural, menurut Vygotsky menyatakan bahwa untuk mengerti pikiran seseorang maka diperlukan sebuah pengetahuan yang bisa mengenai latar belakang sosial budaya dan sejarah kehidupannya. Berarti untuk memahami pemikiran seseorang maka bukan hanya dengan cara meneliti apa yang ada pada otak atau jiwa orang tersebut melainkan

pada asal usul dari tindakan yang ia lakukan secara sadar berdasarkan sejarah dan latar belakang kehidupan orang tersebut.

Model pembelajaran Jurisprudensi dimaksudkan untuk peserta didik yang pada kenyataannya merupakan anggota dari masyarakat dituntut mempunyai kemampuan untuk menghargai perbedaan pandangan dan sikap pada sebuah isu sosial pendidikan yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat.

Model pembelajaran Jurisprudensi dirancang untuk mengajarkan peserta didik secara langsung berkomitmen terhadap peranan orang lain dan kemampuan berdialog. Secara tidak langsung peserta didik dapat memiliki kemampuan menganalisis isu-isu sosial, menghargai pluralism, memahami fakta-fakta masalah sosial dan memiliki kemampuan ikut berpartisipasi serta kesediaan melakukan berbagai tindakan sosial yang positif.

Selain manfaat bagi peserta didik, model Jurisprudensi juga menuntut guru agar lebih kreatif dan inovatif terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat dan mengaitkannya dalam proses pembelajaran. Guru harus menggali wawasan yang cukup dan dapat mengambil posisi terlebih dahulu dengan argumentasi yang cukup. Pada saat proses pembelajaran berlangsung peserta didik akan mudah memberikan pertanyaan konfrontatif begitu masalah telah ditetapkan.

Strategi belajar dengan model Jurisprudensi menuntut dialog interaktif antara guru dengan peserta didik untuk mengeksplorasi ranah publik yang kontroversi sehingga dimungkinkan terjadi dialog. Disinilah peran guru lebih dituntut untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dalam debat. Untuk mengubah model pembelajaran dari ceramah yang kurang menuntut keaktifan siswa ke model Jurisprudensi yang menuntut siswa lebih aktif, model ini dapat sedikit menyulitkan guru pada awal penerapannya karena tidak biasa dalam menyusun persiapan dan tindakan di kelas. Peserta didik juga sulit dalam mengutarakan pendapatnya pada awal penerapan model ini, dan akan menjadi kebiasaan berpendapat jika diterapkan setiap kali berkembang isu hangat di dalam proses pembelajaran.

Dalam materi pembelajaran sejarah banyak terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat kontroversial. Materi pembelajaran sejarah tersebut misalnya;

- 1) Kebijakan Soekarno untuk melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur menjelang penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 dan Ganefo tahun 1963 yang mengakibatkan Indonesia terpuruk dalam hyperinflasi yang mencapai 650%.
- 2) Diterbitkannya Undang-Undang No. 86 tahun 1968 tentang nasionalisme perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berakibat merosotnya pasar modal karena perginya para investor asing.
- 3) Kebijakan politik pintu terbuka pada masa pemerintahan Soeharto yang menyebabkan Indonesia secara langsung masuk dalam pusaran ekonomi liberal kapitalis.
- 4) Kebijakan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru yang secara tidak langsung menjadi legalitas ABRI untuk berpolitik.
- 5) Kebijakan pemerintah masa Orde Baru yang cenderung sentralistik menyebabkan kepentingan daerah di luar pulau Jawa menjadi terabaikan.
- 6) Kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada masa Reformasi yang menyebabkan seringnya pertikaian antara pendukung calon kepala daerah dan pemborosan anggaran.

Materi-materi tersebut dapat diajarkan dengan menggunakan model Jurisprudensi. Contoh penggunaan model ini dalam pembelajaran sejarah:

- a) Langkah 1; mengarahkan peserta didik pada kasus
Aplikasi; pada tahap ini guru memperkenalkan materi kasus atau mereview fakta.
- b) Langkah 2; mengidentifikasi isu
Aplikasi; guru dan peserta didik mengidentifikasi isu (sesuai tema yang dipilih) kemudian mengidentifikasi nilai dan konflik nilai. Misalnya pada tema “kebijakan Soekarno menyambut Asian Games dan Ganefo”, dari tema dapat dirumuskan beberapa fakta dan nilai, misalnya;
  - Kebanggaan pada bangsa

- Orientasi kebijakan ekonomi
- Kesenjangan ekonomi
- Sikap nasionalisme yang berlebihan dan sebagainya

Dari nilai dan fakta tersebut dapat dirumuskan adanya konflik nilai antara kebijakan dengan meningkatnya inflasi yang berakibat pada peningkatan angka penduduk miskin.

- c) Langkah 3; menentukan sikap (memposisikan diri)
Aplikasi; peserta didik diminta memilih berada pada posisi pro atau kontra, kemudian mempertimbangkan dampak dari masing-masing pilihan.
- d) Langkah 4; mengeksplorasi sikap; bentuk argumentasi
Aplikasi; peserta didik diminta menyusun argumentasi dan penjelasan mengapa pilihan yang mereka pilih menjadi prioritas untuk dilakukan.
- e) Langkah 5; memperhalus dan mengkualifikasikan posisi
Aplikasi; peserta didik diminta menyatakan alasan mengambil posisi tersebut serta membuat perbandingan dengan beberapa situasi yang mirip.
- f) Langkah 6; menguji asumsi-asumsi faktual
Aplikasi; peserta didik mengidentifikasi argumen yang dibuat dan menganalisa apakah argumen tersebut relevan, selanjutnya mempertimbangkan bagaimana kalau asumsi tersebut benar-benar terjadi.

Kelebihan dan Kekurangan model Jurisprudensi:

- 1) Kelebihan model Jurisprudensi;
  - Memotivasi peserta didik untuk aktif menganalisis sebuah kasus sehingga tidak mudah menentukan sikap dan menyimpulkan tanpa sadar.
  - Memotivasi peserta didik untuk berdebat aktif secara aktif dan memberikan argumen logis dan rasional.
  - Mengembangkan keterbukaan dan menghargai perbedaan pendapat.
  - Mengembangkan pengetahuan dan wawasan peserta didik.

- Banyak isu sosial dalam masyarakat sehingga model ini mudah diterapkan.
- 2) Kelemahan model Jurisprudensi yaitu;
- Membutuhkan implementasi yang cukup lama karena perubahan metode pembelajaran sebelumnya yang kurang menuntut keaktifan peserta didik.
  - Cukup sulit untuk mengarahkan argumentasi peserta didik pada awalnya karena tidak semua peserta didik mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi debat kusir.

PENUTUP

Model pembelajaran Jurisprudensi secara spesifik dimaksudkan agar peserta didik dapat belajar merespon kebijakan sosial maupun kebijakan politik yang mempunyai dampak terhadap lingkungan sosial. Dalam materi pembelajaran sejarah banyak terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat kontroversial. Pembahasan kontroversial dalam pembelajaran sejarah berpotensi membuat peserta didik bertanya-tanya terkait kebenaran peristiwa sejarah.

Model Jurisprudensi ini sangat menarik untuk di uji coba dan dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas karena selain melatih peserta didik untuk bersikap, lebih jauh lagi model ini juga melatih sikap kritis peserta didik atas kebenaran suatu fakta sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Suyono. 2011. *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Rosdakarya.

Nugroho, Wibowo. 2016. *Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar Di SMK Negeri 1 Saptosari*. Jurnal *Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Volume 1, Nomor 2, Mei 2016. Dikutip pada 21 April 2020. Diakses di: <https://journal.uny.ac.id/index.php/elinvo/article/viewFile/10621/8996>

Rismayana, Vivin. 2018. *Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis-Historis Peserta Didik (Studi Kasus di SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang)*. *Historia Pedagogi: Jurnal Penelitian dan Inovasi Pendidikan Sejarah*. Vol. 7. No. 1. Juni 2018 [ISSN: 2301-489X] Hlm. 75-82. Dikutip pada 21 April 2020. Diakses di: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/hp>

<https://www.ruangdiary.com/2019/09/trik-guru-agar-siswa-aktif-di-kelas.html?m=1>

Hermanto, Rudi. 2016. *Peningkatan Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran Sejarah Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivistik*. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol.5 No.1 Januari 2016. Dikutip pada 21 April 2020. Diakses di: DOI: <https://doi.org/10.21009/JPS.051.01>

Susanto, Heri. 2015. *Menghadirkan Kelas Konstruktivis dalam Melatih Kemampuan Berpikir Historis Melalui Model Latihan Penelitian*. In: *Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan Asosiasi Pendidikan dan Penelitian Sejarah*. Dikutip pada 21 April 2020. Diakses di: <http://eprints.ulm.ac.id/8577/>

Susanto, Heri. Helmi Akmal. 2019. *Media Pembelajaran Sejarah Era Teknologi Informasi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Supratmi, Nunung. 2011. *Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi Pada Pembelajaran Keterampilan Berbicara Kritis Dengan Menggunakan Metode Debat Konfrontatif*. Jurnal Pendidikan, Volume 12, Nomor 2, September 2011, 75-79. Dikutip pada 21 April 2020. Diakses di: <http://ilp.ut.ac.id/index.php/JP/article/download/119/95/>

Yanto, Murni. 2017. *Penerapan Teori Sosial Dalam Menumbuhkan Akhlak Anak Kelas I Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rejang Lebong*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017. Dikutip pada 21 April 2020. Diakses di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/download/2218/1663>

<https://es.scribd.com/doc/295942688/Teori-Belajar-Revolusi-Sosio-kultural>

Pamungkas, Satriyo. 2013. *Model Pembelajaran Yurisprudensi Dalam Pembelajaran Sejarah*. Diakses di: <http://tiocalpucino.blogspot.com/2013/02/model-pembelajaran-yurisprudensi.html?m=1>

Susanto, Heri. 2014. *Seputar Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran)*. Banjarmasin: Aswaja Pressindo.